

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan skripsi penulis yang berjudul "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menegakkan PERDA NO. 37 TAHUN 2005 Tentang Hewan Lepas Di Kabupaten Pohuwato." penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Sudah sangat jelas bahwa dari kinerja satpol pp dalam melakukan penegakan sudah di bilang maksimal dari hasil wawancara peneliti dengan seorang pimpinan satpol PP Kabupaten pohuwato namun efektif atau tidaknya ini tidak hanya di tentukan dengan penegakan dari satpol pp namun juga harus di landasi dengan kesadaran dari masyarakat khususnya dari pemilik hewan ternak tersebut agar lebih menrtibkan kembali hewan ternaknya sampai dengan sekarang kesadaran masyarakat masih sangat kurang.
2. Kendala pemerintah dalam melakukan penegakan khususnya satpol PP terkendala dengan kurangnya personil dari satpol PP tersebut hal itu menjadi kendala besar satpol PP dalam melakukan pengawasan apalagi di tiap-tiap kecamatan yang harus di awasi satu per satu dulunya memang mereka sering mengawasi di tiap-tiap kecamatan namun karena berkurangnya personil sekarang hanya di lakukan pengawasan yang tidak rutin tentunya ini sangat menjadi kendala besar apalagi di tambah dengan kesadaran masyarakat yang kurang.

## 5.2 Saran

1. Efektif dan tidaknya suatu peraturan di satu wilayah itu di tentukan dari 3 hal menurut *Lawrens Friedman* yaitu *Structural, substansi Dan Budaaya hukum* peraturan daerah ini kiranya harus mengimplemntasikan ketiga hal tersebut.
2. Kepada Pemerintah, harus memberikan perhatian lebih dalam sosialisasi/penyebarnya peraturan perundang-undangan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, mengetahui Undang-Undang apa yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan tidak efektifnya perda hewan lepas.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Abd muhaimin Doholio, 2011, *Efektifitas 3 peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah* Dikecamatan Lemito Pohuwato. Hlm 9.

Christine S.T Kansil, S.H.,M.H, 2001 *Hukum Administrasi Daerah*.Sinar Grafika.Jakarta

Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, 2000. Dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia,

Dikutip Meuthia-Rochman dalam artikel berjudul “*Good Governance*”: Prinsip, Komponen dan Penerapannya, 2000 yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta; Komnas HAM.

Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si.2011.*Sistim Pemerintahan Indonesia*.jakarta.Rineka Cipta.Hlm 8.

HAW. Widjaja.2005. Dalam rangka sosiaalisasi uu no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. Jakarta. Rajawali pers. Hlm 36

Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti,

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153

Prof.Drs.C.S. Kansil,SH. 2001.*Hukum Administrasi Negara* .Sinar Grafika. Jakarta

Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.2010.*Perihal undang-undang*, Rajawali pers.Jakarta

Ridwan HR,2006. *hukum administrasi Negara*. Jakarta raja grafindo persada

Rachmat Trijono.2013.*Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*.papas sinar sinanti. Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 380.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172

Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Jakarta. Hlm. 580

wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Linmas, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS) pada tanggal 4 April 2017 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pohuwato

## **B. Undang- Undang**

Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea ke-4

UUD 1945 Pasal 18 ayat 3

Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya, Hlm 14

## **C. Internet**

<http://sistem.pemerintahan.indonesia>, makalah *la idi stanbuk Ilmu logika sistem pemerintahan indonesia*. Di unduh tanggal 12 september 2014